



RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Bidang Pendidikan adalah unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pada Satuan Pendidikan di wilayah kerja Kapanewon.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
19. Kepala adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama.
20. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas.
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. TK;
 - c. SD; dan
 - d. SMP.

BAB III SANGGAR KEGIATAN BELAJAR Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi PAUD dan PNF.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF.

Pasal 6

Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. pembentukan rombongan belajar program PAUD dan PNF;
- c. penyelenggaraan pembelajaran program PAUD dan PNF;
- d. pembimbingan program PAUD;
- e. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar pada PAUD dan PNF;
- f. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program PAUD dan PNF;
- g. penyelenggaraan program percontohan program PAUD dan PNF;
- h. penyelenggaraan kalurahan binaan PAUD dan PNF;
- i. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait program PAUD dan PNF;
- j. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- k. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- l. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas di bidang tata usaha dibantu Urusan Tata Usaha.
- (2) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat pelaksana.

- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat pelaksana, Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dari Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha.
- (6) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditugaskan oleh Kepala dengan surat tugas.
- (7) Urusan Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja anggaran Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. pelaksanaan administrasi kurikulum dan peserta didik;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
 - e. penatausahaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan barang milik daerah pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan data dan sistem informasi ;
 - j. pelayanan informasi pada Sanggar Kegiatan Belajar;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Urusan Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas pada Sanggar Kegiatan Belajar sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB IV TAMAN KANAK-KANAK Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 9

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi PAUD dan PNF yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan.
- (2) TK merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan TK.
- (3) TK dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi TK, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Nama TK yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Umum

Pasal 12

TK mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan anak usia dini.

Pasal 13

TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan TK;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada TK;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada TK;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pendidikan pada TK;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan pada TK;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada TK;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada TK, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis bidang pendidikan pada TK dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada TK;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada TK;
- k. pembinaan kepegawaian pada TK;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pada TK sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan

BAB V
SEKOLAH DASAR
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SD yang secara administratif dibina oleh Korwil Bidang Pendidikan.
- (2) SD merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SD.
- (3) SD dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi SD, terdiri atas :
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Nama SD yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

SD mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.

Pasal 19

SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang SD;
- b. penyiapan kebijakan teknis pendidikan pada SD;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada SD;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis pendidikan pada SD;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan SD;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada SD;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada SD, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;

- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis pendidikan pada SD dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pendidikan pada SD;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada SD;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup SD;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas pada SD sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

BAB VI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Bagian Kesatu Kedudukan

- Pasal 21
- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SMP.
 - (2) SMP merupakan kelompok layanan pendidikan yang membantu pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan formal jenjang SMP.
 - (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala.
 - (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat nonstruktural yang diangkat dari Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- Pasal 22
- (1) Susunan Organisasi SMP, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - (2) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Nama SMP yang merupakan kelompok layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 24

SMP mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah pertama.

Pasal 25

SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan program pendidikan jenjang pendidikan SMP;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang pendidikan pada SMP;
- c. penyediaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan bidang pendidikan pada SMP;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan pada SMP;
- e. pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan SMP;
- f. pengendalian penyediaan sarana dan fasilitas belajar pada SMP;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektoral pada SMP, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- h. pengoordinasian kegiatan dan kerja sama teknis bidang pendidikan pada SMP dengan unit kerja terkait;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan pada SMP;
- j. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas pada SMP;
- k. pembinaan kepegawaian pada lingkup SMP;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Wakil Kepala

Pasal 26

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Kepala.
- (2) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan nonstruktural yang diangkat dari pejabat fungsional guru dengan keputusan Kepala.
- (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas di bidang:
 - a. akademik;
 - b. kesiswaan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. hubungan masyarakat; dan
 - e. administrasi SMP.
- (6) Dalam hal melaksanakan tugas administrasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, Wakil Kepala dibantu oleh Pejabat Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala.

- (7) Wakil Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyusunan rencana kegiatan di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi SMP;
 - e. penyusunan laporan kinerja Wakil Kepala;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas pada SMP sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d mempunyai ketugasan sesuai dengan analisis jabatan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

BAB VII
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Korwil Bidang Pendidikan pada Dinas.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di beberapa Kapanewon.
- (3) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Korwil Bidang Pendidikan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada SD dan TK di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi SD.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pejabat fungsional pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (5) Korwil Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Korwil Bidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan penjaminan mutu pendidikan pada SD dan TK di wilayah kerjanya.
- (2) Korwil Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan TK dan SD di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi lomba di wilayah kerjanya;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Korwil Bidang Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Bidang dan Seksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 32

Setiap jabatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Kepala mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 34

Kepala dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya; dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada Kepala.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan:
 - a. secara perorangan; dan/atau

- b. dalam tim kerja.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.
- (4) Penugasan melalui penunjukan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala.
- (5) Penugasan melalui pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Kepala untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (6) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.
- (7) Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja.

Pasal 36

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. ijasah yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan dengan nomenklatur lama tetap berlaku;
- b. penyesuaian nomenklatur Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati diundangkan; dan
- c. penataan kelembagaan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

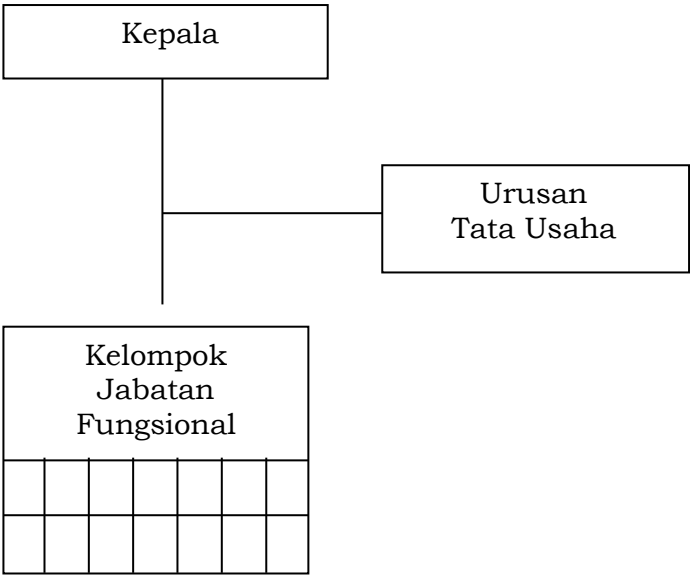
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

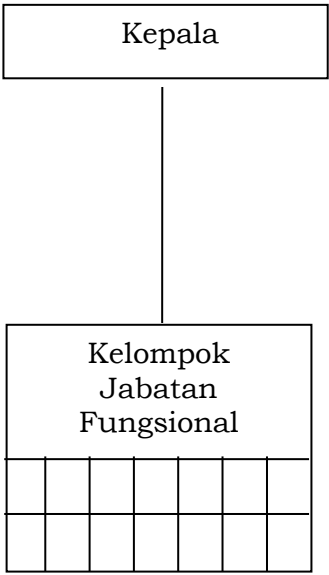
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

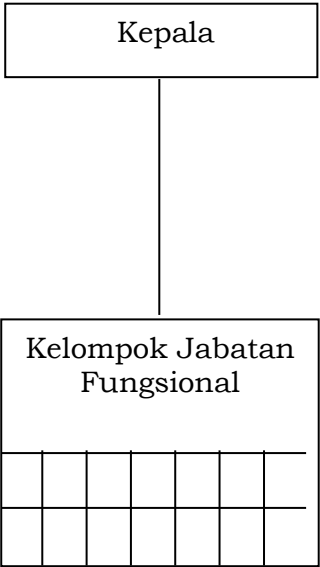
A. Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar



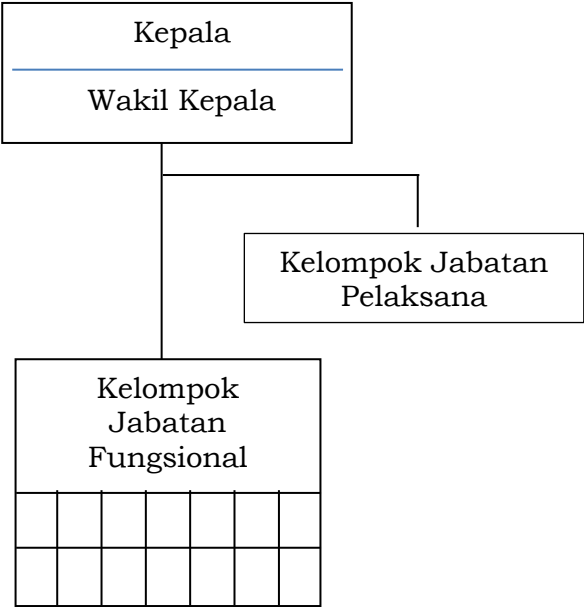
B. Bagan Susunan Organisasi TK



C. Bagan Susunan Organisasi SD



D. Bagan Susunan Organisasi SMP



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA

NAMA TAMAN KANAK-KANAK
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI	KAPANEWON
1.	TK NEGERI PEMBINA BANTUL	Sewon
2.	TK NEGERI SRANDAKAN	Srandakan
3.	TK NEGERI 1 KRETEK	Kretek
4.	TK NEGERI 2 KRETEK	Kretek
5.	TK NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
6.	TK NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan
7.	TK NEGERI 1 PANDAK	Pandak
8.	TK NEGERI 1 SANDEN	Sanden
9.	TK NEGERI 1 PUNDONG	Pundong
10.	TK NEGERI 1 BANTUL	Bantul
11.	TK NEGERI 1 JETIS	Jetis
12.	TK NEGERI 1 IMOGIRI	Imogiri

NOMOR	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI	KAPANEWON
13.	TK NEGERI 1 DLINGO	Dlingo
14.	TK NEGERI 1 BANGUNTAPAN	Banguntapan
15.	TK NEGERI 1 PLERET	Pleret
16.	TK NEGERI 1 PIYUNGAN	Piyungan
17.	TK NEGERI 1 KASIHAN	Kasihani
18.	TK NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN
 KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NAMA SEKOLAH DASAR
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
1.	SD NEGERI 3 PANGGANG	SD NEGERI 3 PANGGANG	Bambanglipuro
2.	SD NEGERI TULASAN	SD NEGERI TULASAN	Bambanglipuro
3.	SD SRIBIT	SD NEGERI SRIBIT	Bambanglipuro
4.	SD NEGERI KALIGONDANG	SD NEGERI KALIGONDANG	Bambanglipuro
5.	SD NEGERI KEMBANGAN	SD NEGERI KEMBANGAN	Bambanglipuro
6.	SD PANGGANG	SD NEGERI PANGGANG	Bambanglipuro
7.	SD NEGERI TERBAN	SD NEGERI TERBAN	Bambanglipuro
8.	SD NEGERI BONDALEM	SD NEGERI BONDALEM	Bambanglipuro
9.	SD NEGERI PLEBENGAN	SD NEGERI PLEBENGAN	Bambanglipuro
10.	SD NEGERI GROGOL	SD NEGERI GROGOL	Bambanglipuro
11.	SD NEGERI PLAKARAN	SD NEGERI PLAKARAN	Banguntapan
12.	SD NEGERI SAMPANGAN	SD NEGERI SAMPANGAN	Banguntapan
13.	SD NEGERI WIYORO	SD NEGERI WIYORO	Banguntapan
14.	SD NEGERI BANGUNTAPAN	SD NEGERI BANGUNTAPAN	Banguntapan
15.	SD NEGERI BATURETNO	SD NEGERI BATURETNO	Banguntapan
16.	SD NGENTAK	SD NEGERI NGENTAK	Banguntapan
17.	SD NEGERI WIROKERTEN	SD NEGERI WIROKERTEN	Banguntapan
18.	SD NEGERI SINGOSAREN	SD NEGERI SINGOSAREN	Banguntapan

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
19.	SD NEGERI 1 SALAKAN	SD NEGERI 1 SALAKAN	Banguntapan
20.	SD NEGERI 2 SALAKAN	SD NEGERI 2 SALAKAN	Banguntapan
21.	SD POTORONO	SD NEGERI POTORONO	Banguntapan
22.	SD NEGERI 1 JAMBIDAN	SD NEGERI 1 JAMBIDAN	Banguntapan
23.	SD NEGERI 2 JAMBIDAN	SD NEGERI 2 JAMBIDAN	Banguntapan
24.	SD NEGERI JOMBLANGAN	SD NEGERI JOMBLANGAN	Banguntapan
25.	SD NEGERI JURUGENTONG	SD NEGERI JURUGENTONG	Banguntapan
26.	SD NEGERI MUTIHAN	SD NEGERI MUTIHAN	Banguntapan
27.	SD NEGERI TAMANAN	SD NEGERI TAMANAN	Banguntapan
28.	SD NEGERI 1 SEKARSULI	SD NEGERI 1 SEKARSULI	Banguntapan
29.	SD NEGERI SOKOWATEN BARU	SD NEGERI SOKOWATEN BARU	Banguntapan
30.	SD NEGERI GROJOGAN	SD NEGERI GROJOGAN	Banguntapan
31.	SD NEGERI JARANAN	SD NEGERI JARANAN	Banguntapan
32.	SD TERUMAN	SD NEGERI TERUMAN	Bantul
33.	SD NEGERI SUTRAN	SD NEGERI SUTRAN	Bantul
34.	SD NEGERI 1 PALBAPANG	SD NEGERI 1 PALBAPANG	Bantul
35.	SD 1 TRIRENGGO	SD NEGERI 1 TRIRENGGO	Bantul
36.	SD BANTUL WARUNG	SD NEGERI BANTUL WARUNG	Bantul
37.	SD NEGERI PENI	SD NEGERI PENI	Bantul
38.	SD NEGERI PRIYAN	SD NEGERI PRIYAN	Bantul
39.	SD TEGALDOWO	SD NEGERI TEGALDOWO	Bantul
40.	SD NEGERI 3 BANTUL	SD NEGERI 3 BANTUL	Bantul
41.	SD NEGERI 2 SABDODADI	SD NEGERI 2 SABDODADI	Bantul
42.	SD NEGERI PALBAPANG BARU	SD NEGERI PALBAPANG BARU	Bantul
43.	SD NEGERI MANDING TENGAH	SD NEGERI MANDING TENGAH	Bantul

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
44.	SD KARANGMOJO	SD NEGERI KARANGMOJO	Bantul
45.	SD NEGERI BANTUL TIMUR	SD NEGERI BANTUL TIMUR	Bantul
46.	SD NEGERI 1 BANTUL	SD NEGERI 1 BANTUL	Bantul
47.	SD NEGERI RINGINHARJO	SD NEGERI RINGINHARJO	Bantul
48.	SD NEGERI SABDODADI KEYONGAN	SD NEGERI SABDODADI KEYONGAN	Bantul
49.	SD NEGERI 1 JATIMULYO	SD NEGERI 1 JATIMULYO	Dlingo
50.	SD NEGERI 1 BANJARHARJO	SD NEGERI 1 BANJARHARJO	Dlingo
51.	SD NEGERI 2 BANJARHARJO	SD NEGERI 2 BANJARHARJO	Dlingo
52.	SD NEGERI 1 SUKORAME	SD NEGERI 1 SUKORAME	Dlingo
53.	SD N I TEMUWUH	SD NEGERI 1 TEMUWUH	Dlingo
54.	SD NEGERI 2 TEMUWUH	SD NEGERI 2 TEMUWUH	Dlingo
55.	SD NEGERI 3 TEMUWUH	SD NEGERI 3 TEMUWUH	Dlingo
56.	SD NEGERI BANYUURIP	SD NEGERI BANYUURIP	Dlingo
57.	SD SENDANGSARI	SD NEGERI SENDANGSARI	Dlingo
58.	SD NEGERI SEROPAN	SD NEGERI SEROPAN	Dlingo
59.	SD NEGERI DLINGO	SD NEGERI DLINGO	Dlingo
60.	SD SEMUTEN	SD NEGERI SEMUTEN	Dlingo
61.	SD NEGERI PAKIS	SD NEGERI PAKIS	Dlingo
62.	SD NEGERI 2 TERONG	SD NEGERI 2 TERONG	Dlingo
63.	SD NEGERI SURUH	SD NEGERI SURUH	Dlingo
64.	SD NEGERI 1 TERONG	SD NEGERI 1 TERONG	Dlingo
65.	SD NEGERI 1 DODOGAN	SD NEGERI 1 DODOGAN	Dlingo
66.	SD NEGERI 2 DODOGAN	SD NEGERI 2 DODOGAN	Dlingo
67.	SD NEGERI TANGKIL	SD NEGERI TANGKIL	Dlingo
68.	SD NEGERI MANGUNAN	SD NEGERI MANGUNAN	Dlingo

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
69.	SD NEGERI PELEM	SD NEGERI PELEM	Dlingo
70.	SD NEGERI KANIGORO	SD NEGERI KANIGORO	Dlingo
71.	SD NEGERI IMOGIRI	SD NEGERI IMOGIRI	Imogiri
72.	SD NEGERI SOMPOK	SD NEGERI SOMPOK	Imogiri
73.	SD NEGERI KEDUNG MIRI	SD NEGERI KEDUNG MIRI	Imogiri
74.	SD NEGERI KEBONAGUNG	SD NEGERI KEBONAGUNG	Imogiri
75.	SD NEGERI PUNDUNG	SD NEGERI PUNDUNG	Imogiri
76.	SD NEGERI KARANGTENGAH BARU	SD NEGERI KARANGTENGAH BARU	Imogiri
77.	SD NEGERI NOGOSARI	SD NEGERI NOGOSARI	Imogiri
78.	SD NEGERI GIRIWUNGU	SD NEGERI GIRIWUNGU	Imogiri
79.	SD NEGERI LANTENG BARU	SD NEGERI LANTENG BARU	Imogiri
80.	SD NEGERI SRIHARJO	SD NEGERI SRIHARJO	Imogiri
81.	SD NEGERI PUCUNG	SD NEGERI PUCUNG	Imogiri
82.	SD NEGERI BANGO	SD NEGERI BANGO	Imogiri
83.	SD NEGERI 3 IMOGIRI	SD NEGERI 3 IMOGIRI	Imogiri
84.	SD NEGERI WUKIRSARI	SD NEGERI WUKIRSARI	Imogiri
85.	SD NEGERI KALIDADAP	SD NEGERI KALIDADAP	Imogiri
86.	SD NEGERI SRUNGGO	SD NEGERI SRUNGGO	Imogiri
87.	SD NEGERI LEMAH RUBUH	SD NEGERI LEMAH RUBUH	Imogiri
88.	SD NEGERI NGASINAN	SD NEGERI NGASINAN	Imogiri
89.	SD NEGERI NAWUNGAN	SD NEGERI NAWUNGAN	Imogiri
90.	SD NEGERI NGRANCAH	SD NEGERI NGRANCAH	Imogiri
91.	SD NEGERI SILUK	SD NEGERI SILUK	Imogiri
92.	SD NEGERI PATALAN BARU	SD NEGERI PATALAN BARU	Jetis
93.	SD NEGERI 1 PATALAN	SD NEGERI 1 PATALAN	Jetis

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
94.	SD NEGERI 2 PATALAN	SD NEGERI 2 PATALAN	Jetis
95.	SD NEGERI KEPUH	SD NEGERI KEPUH	Jetis
96.	SD NEGERI CANDEN	SD NEGERI CANDEN	Jetis
97.	SD NEGERI JETIS	SD NEGERI JETIS	Jetis
98.	SD NEGERI SINDET	SD NEGERI SINDET	Jetis
99.	SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG	SD NEGERI 2 SUMBERAGUNG	Jetis
100.	SD NEGERI SAWAHAN	SD NEGERI SAWAHAN	Jetis
101.	SD NEGERI 1 BARONGAN	SD NEGERI 1 BARONGAN	Jetis
102.	SD NEGERI KEMBANGSONGO	SD NEGERI KEMBANGSONGO	Jetis
103.	SD NEGERI BENDOSARI	SD NEGERI BENDOSARI	Jetis
104.	SD NEGERI KOWANG	SD NEGERI KOWANG	Jetis
105.	SD NEGERI BAKULAN	SD NEGERI BAKULAN	Jetis
106.	SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG	SD NEGERI 1 SUMBERAGUNG	Jetis
107.	SD NEGERI 2 BARONGAN	SD NEGERI 2 BARONGAN	Jetis
108.	SD NEGERI 1 PADOKAN	SD NEGERI 1 PADOKAN	Kasihan
109.	SD NEGERI KALANGAN	SD NEGERI KALANGAN	Kasihan
110.	SD NEGERI SONOSEWU	SD NEGERI SONOSEWU	Kasihan
111.	SD NEGERI DONOTIRTO	SD NEGERI DONOTIRTO	Kasihan
112.	SD NEGERI NGRUKEMAN	SD NEGERI NGRUKEMAN	Kasihan
113.	SD NEGERI BANYURIPAN	SD NEGERI BANYURIPAN	Kasihan
114.	SD NEGERI KALIPUCANG	SD NEGERI KALIPUCANG	Kasihan
115.	SD NEGERI 2 PADOKAN	SD NEGERI 2 PADOKAN	Kasihan
116.	SD NEGERI REJODADI	SD NEGERI REJODADI	Kasihan
117.	SD BRAJAN	SD NEGERI BRAJAN	Kasihan
118.	SD NEGERI BIBIS	SD NEGERI BIBIS	Kasihan

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
119.	SD NEGERI 1 KADIPIRO	SD NEGERI 1 KADIPIRO	Kasihan
120.	SD NEGERI KASIHAN	SD NEGERI KASIHAN	Kasihan
121.	SD NEGERI NIRMALA	SD NEGERI NIRMALA	Kasihan
122.	SD NEGERI WINONGO	SD NEGERI WINONGO	Kasihan
123.	SD NEGERI SEMBUNGAN	SD NEGERI SEMBUNGAN	Kasihan
124.	SD NEGERI 3 KADIPIRO	SD NEGERI 3 KADIPIRO	Kasihan
125.	SD NEGERI NGEBEL	SD NEGERI NGEBEL	Kasihan
126.	SD N 1 SRIBITAN	SD NEGERI 1 SRIBITAN	Kasihan
127.	SD NEGERI KARANGJATI	SD NEGERI KARANGJATI	Kasihan
128.	SD NEGERI BANGUNJIWO	SD NEGERI BANGUNJIWO	Kasihan
129.	SD NEGERI TLOGO	SD NEGERI TLOGO	Kasihan
130.	SD KASONGAN	SD NEGERI KASONGAN	Kasihan
131.	SD NEGERI 2 KADIPIRO	SD NEGERI 2 KADIPIRO	Kasihan
132.	SD NEGERI SAMBIKEREP	SD NEGERI SAMBIKEREP	Kasihan
133.	SD NEGERI 2 DONOTIRTO	SD NEGERI 2 DONOTIRTO	Kretek
134.	SD NEGERI KAREN	SD NEGERI KAREN	Kretek
135.	SD NEGERI BUNGKUS	SD NEGERI BUNGKUS	Kretek
136.	SD NEGERI 2 PARANGTRITIS	SD NEGERI 2 PARANGTRITIS	Kretek
137.	SD NEGERI TIRTOHARGO	SD NEGERI TIRTOHARGO	Kretek
138.	SD NEGERI TIRTOMULYO	SD NEGERI TIRTOMULYO	Kretek
139.	SD 2 KRETEK	SD NEGERI 2 KRETEK	Kretek
140.	SD NEGERI 1 DONOTIRTO	SD NEGERI 1 DONOTIRTO	Kretek
141.	SD NEGERI 1 PARANGTRITIS	SD NEGERI 1 PARANGTRITIS	Kretek
142.	SD NEGERI 1 KRETEK	SD NEGERI 1 KRETEK	Kretek
143.	SD NEGERI TIRTOSARI	SD NEGERI TIRTOSARI	Kretek

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
144.	SD NEGERI SONO	SD NEGERI SONO	Kretek
145.	SD NEGERI CIMPON	SD NEGERI CIMPON	Kretek
146.	SD NEGERI MANGIR LOR	SD NEGERI MANGIR LOR	Pajangan
147.	SD NEGERI KREBET	SD NEGERI KREBET	Pajangan
148.	SD NEGERI KADIRESA	SD NEGERI KADIRESA	Pajangan
149.	SD NEGERI 1 IROYUDAN	SD NEGERI 1 IROYUDAN	Pajangan
150.	SD NEGERI GUWO	SD NEGERI GUWO	Pajangan
151.	SD NEGERI TRUCUK	SD NEGERI TRUCUK	Pajangan
152.	SD NEGERI GUWOSARI	SD NEGERI GUWOSARI	Pajangan
153.	SD NEGERI KEMBANGPUTIHAN	SD NEGERI KEMBANGPUTIHAN	Pajangan
154.	SD NEGERI BEJI	SD NEGERI BEJI	Pajangan
155.	SD NEGERI SENDANGSARI	SD NEGERI SENDANGSARI	Pajangan
156.	SD NEGERI TRIWIDADI	SD NEGERI TRIWIDADI	Pajangan
157.	SD NEGERI BONGSREN	SD NEGERI BONGSREN	Pandak
158.	SD NEGERI 1 WIJIREJO	SD NEGERI 1 WIJIREJO	Pandak
159.	SD NEGERI PAYUNGAN	SD NEGERI PAYUNGAN	Pandak
160.	SD NEGERI GUNTING	SD NEGERI GUNTING	Pandak
161.	SD NEGERI KREKAH	SD NEGERI KREKAH	Pandak
162.	SD NEGERI GUMULAN	SD NEGERI GUMULAN	Pandak
163.	SD NEGERI GUNTURAN	SD NEGERI GUNTURAN	Pandak
164.	SD NEGERI JIGUDAN	SD NEGERI JIGUDAN	Pandak
165.	SD NEGERI 1 PANDAK	SD NEGERI 1 PANDAK	Pandak
166.	SD NEGERI BANTULAN	SD NEGERI BANTULAN	Pandak
167.	SD NEGERI TUNJUNGAN	SD NEGERI TUNJUNGAN	Pandak
168.	SD NEGERI GLAGAHAN	SD NEGERI GLAGAHAN	Pandak

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
169.	SD NEGERI BOGO	SD NEGERI BOGO	Pandak
170.	SD NEGERI NGENTAKMANGIR	SD NEGERI NGENTAKMANGIR	Pandak
171.	SD NEGERI 2 WIJIREJO	SD NEGERI 2 WIJIREJO	Pandak
172.	SD NEGERI SALAM	SD NEGERI SALAM	Pandak
173.	SD NEGERI DALEMAN	SD NEGERI DALEMAN	Pandak
174.	SD NEGERI CIREN	SD NEGERI CIREN	Pandak
175.	SD NEGERI NGABLAK	SD NEGERI NGABLAK	Piyungan
176.	SD NEGERI MANDUNGAN	SD NEGERI MANDUNGAN	Piyungan
177.	SD 1 CEPOKOJAJAR	SD NEGERI 1 CEPOKOJAJAR	Piyungan
178.	SD NEGERI 2 CEPOKOJAJAR	SD NEGERI 2 CEPOKOJAJAR	Piyungan
179.	SD BANYAKAN	SD NEGERI BANYAKAN	Piyungan
180.	SD NEGERI 1 PETIR	SD NEGERI 1 PETIR	Piyungan
181.	SD NEGERI KABREGAN	SD NEGERI KABREGAN	Piyungan
182.	SD NEGERI KARANGGAYAM	SD NEGERI KARANGGAYAM	Piyungan
183.	SD NEGERI PIYUNGAN	SD NEGERI PIYUNGAN	Piyungan
184.	SD NEGERI KALIGATUK	SD NEGERI KALIGATUK	Piyungan
185.	SDN PAYAK	SD NEGERI PAYAK	Piyungan
186.	SD NEGERI BINTARAN	SD NEGERI BINTARAN	Pundong
187.	SD NEGERI JOMBOR	SD NEGERI JOMBOR	Piyungan
188.	SD NEGERI 2 PETIR	SD NEGERI 2 PETIR	Piyungan
189.	SD NEGERI KLENGGOTAN	SD NEGERI KLENGGOTAN	Piyungan
190.	SD NEGERI SANANSARI	SD NEGERI SANANSARI	Piyungan
191.	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOSARI	SD NEGERI MOJOSARI	Piyungan
192.	SD NEGERI KEMBANGSARI	SD NEGERI KEMBANGSARI	Piyungan
193.	SD NEGERI JOLOSUTRO	SD NEGERI JOLOSUTRO	Piyungan

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
194.	SD NEGERI KEDUNGPRING	SD NEGERI KEDUNGPRING	Pleret
195.	SD NEGERI WONOLELO	SD NEGERI WONOLELO	Pleret
196.	SD NEGERI PUTREN	SD NEGERI PUTREN	Pleret
197.	SD NEGERI SEGOROYOSO	SD NEGERI SEGOROYOSO	Pleret
198.	SD NEGERI KAUMAN	SD NEGERI KAUMAN	Pleret
199.	SD NEGERI DAHROMO	SD NEGERI DAHROMO	Pleret
200.	SD NEGERI BAWURAN	SD NEGERI BAWURAN	Pleret
201.	SD NEGERI CEGOKAN	SD NEGERI CEGOKAN	Pleret
202.	SD BRAJAN	SD NEGERI BRAJAN	Pleret
203.	SD KARANGGAYAM	SD NEGERI KARANGGAYAM	Pleret
204.	SD NEGERI SRUMBUNG	SD NEGERI SRUMBUNG	Pleret
205.	SD NEGERI JEJERAN	SD NEGERI JEJERAN	Pleret
206.	SD NEGERI KANGGOTAN	SD NEGERI KANGGOTAN	Pleret
207.	SD NEGERI PUNGKURAN	SD NEGERI PUNGKURAN	Pleret
208.	SD NEGERI SEYEGAN	SD NEGERI SEYEGAN	Pundong
209.	SD KATEGAN	SD NEGERI KATEGAN	Pundong
210.	SD N BARAN	SD NEGERI BARAN	Pundong
211.	SD NEGERI SOKA	SD NEGERI SOKA	Pundong
212.	SD NEGERI 1 PANJANGREJO	SD NEGERI 1 PANJANGREJO	Pundong
213.	SD 2 PANJANGREJO	SD NEGERI 2 PANJANGREJO	Pundong
214.	SD NEGERI MONGGANG	SD NEGERI MONGGANG	Pundong
215.	SD BECARI	SD NEGERI BECARI	Pundong
216.	SD NEGERI TULUNG	SD NEGERI TULUNG	Pundong
217.	SD NEGaERI 1 PUNDONG	SD NEGERI I PUNDONG	Pundong
218.	SD NEGERI KLAGARAN	SD NEGERI KLAGARAN	Sanden

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
219.	SD NEGERI TEGALSARI	SD NEGERI TEGALSARI	Sanden
220.	SD NEGERI PIRING	SD NEGERI PIRING	Sanden
221.	SD NEGERI 1 SANDEN	SD NEGERI 1 SANDEN	Sanden
222.	SD N 2 SANDEN	SD NEGERI 2 SANDEN	Sanden
223.	SD NEGERI SOROBAYAN	SD NEGERI SOROBAYAN	Sanden
224.	SD NGENTAK	SD NEGERI NGENTAK	Sanden
225.	SD NEGERI ROJONITEN	SD NEGERI ROJONITEN	Sanden
226.	SD 1 GADINGHARJO	SD NEGERI 1 GADINGHARJO	Sanden
227.	SD NEGERI 2 GADINGHARJO	SD NEGERI 2 GADINGHARJO	Sanden
228.	SD NEGERI WULUHADEG	SD NEGERI WULUHADEG	Sanden
229.	SD NEGERI BONGGALAN	SD NEGERI BONGGALAN	Sanden
230.	SD NEGERI DAYU	SD NEGERI DAYU	Sanden
231.	SD KRAPYAK	SD NEGERI KRAPYAK	Sedayu
232.	SD SUKOHARJO	SD NEGERI SUKOHARJO	Sedayu
233.	SD NEGERI 1 PEDES	SD NEGERI 1 PEDES	Sedayu
234.	SD NEGERI 2 PEDES	SD NEGERI 2 PEDES	Sedayu
235.	SD NEGERI PULUHAN	SD NEGERI PULUHAN	Sedayu
236.	SD NEGERI KLANGON	SD NEGERI KLANGON	Sedayu
237.	SD NEGERI BRONGKOL	SD NEGERI BRONGKOL	Sedayu
238.	SD NEGERI BANDUT	SD NEGERI BANDUT	Sedayu
239.	SD NEGERI PANGGANG	SD NEGERI PANGGANG	Sedayu
240.	SD NEGERI 1 SEDAYU	SD NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu
241.	SD NEGERI 2 SEDAYU	SD NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu
242.	SD NEGERI 3 SEDAYU	SD NEGERI 3 SEDAYU	Sedayu
243.	SD NEGERI JETIS	SD NEGERI JETIS	Sedayu

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
244.	SD NEGERI 1 DINGKIKAN	SD NEGERI 1 DINGKIKAN	Sedayu
245.	SD NEGERI 2 DINGKIKAN	SD NEGERI 2 DINGKIKAN	Sedayu
246.	SD NEGERI KALIBEROT	SD NEGERI KALIBEROT	Sedayu
247.	SD NEGERI 1 SUNGAPAN	SD NEGERI 1 SUNGAPAN	Sedayu
248.	SD NEGERI 2 SUNGAPAN	SD NEGERI 2 SUNGAPAN	Sedayu
249.	SD SUNGAPAN	SD NEGERI SUNGAPAN	Sedayu
250.	SD NEGERI GUNUNG Mulyo	SD NEGERI GUNUNG Mulyo	Sedayu
251.	SD NEGERI 3 JARAKAN	SD NEGERI 3 JARAKAN	Sewon
252.	SD NEGERI 1 BLUNYAHAN	SD NEGERI 1 BLUNYAHAN	Sewon
253.	SD NEGERI 2 BLUNYAHAN	SD NEGERI 2 BLUNYAHAN	Sewon
254.	SD NEGERI JARAKAN	SD NEGERI JARAKAN	Sewon
255.	SD NEGERI BANGUN HARJO	SD NEGERI BANGUN HARJO	Sewon
256.	SD NEGERI KARANGGONDANG	SD NEGERI KARANGGONDANG	Sewon
257.	SD NGOTO	SD NEGERI NGOTO	Sewon
258.	SD NEGERI KRAPYAK WETAN	SD NEGERI KRAPYAK WETAN	Sewon
259.	SD NEGERI 2 WOJO	SD NEGERI 2 WOJO	Sewon
260.	SD NEGERI KEPUHAN	SD NEGERI KEPUHAN	Sewon
261.	SD NEGERI CEPIT	SD NEGERI CEPIT	Sewon
262.	SD NEGERI 1 SEWON	SD NEGERI 1 SEWON	Sewon
263.	SD NEGERI SAWIT	SD NEGERI SAWIT	Sewon
264.	SD NEGERI JURUG	SD NEGERI JURUG	Sewon
265.	SD NEGERI WOJO	SD NEGERI WOJO	Sewon
266.	SD NEGERI BAKALAN	SD NEGERI BAKALAN	Sewon
267.	SD NEGERI BALONG	SD NEGERI BALONG	Sewon
268.	SD NEGERI MONGGANG	SD NEGERI MONGGANG	Sewon

NOMOR	SEKOLAH DASAR NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
269.	SD NEGERI PACAR	SD NEGERI PACAR	Sewon
270.	SD NEGERI TIMBULHARJO	SD NEGERI TIMBULHARJO	Sewon
271.	SD NEGERI JAGERAN	SD NEGERI JAGERAN	Sewon
272.	SD NEGERI GANDOK	SD NEGERI GANDOK	Sewon
273.	SD KORIPAN	SD NEGERI KORIPAN	Srandakan
274.	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	SD NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
275.	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	SD NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan
276.	SD N GUNUNGSAREN	SD NEGERI GUNUNGSAREN	Srandakan
277.	SD NEGERI KRAJAN	SD NEGERI KRAJAN	Srandakan
278.	SD PROKETEN	SD NEGERI PROKETEN	Srandakan
279.	SD NEGERI 1 GODEGAN	SD NEGERI 1 GODEGAN	Srandakan
280.	SD NEGERI TALKONDO	SD NEGERI TALKONDO	Srandakan
281.	SD NEGERI MANGIRAN	SD NEGERI MANGIRAN	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN
 KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
1.	SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	SMP NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
2.	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	SMP NEGERI 2 BAMBANGLIPURO	Bambanglipuro
3.	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN	Banguntapan
4.	SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN	SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN	Banguntapan
5.	SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN	SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN	Banguntapan
6.	SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN	SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN	Banguntapan
7.	SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN	SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN	Banguntapan
8.	SMP NEGERI 1 BANTUL	SMP NEGERI 1 BANTUL	Bantul
9.	SMP NEGERI 2 BANTUL	SMP NEGERI 2 BANTUL	Bantul
10.	SMP NEGERI 3 BANTUL	SMP NEGERI 3 BANTUL	Bantul
11.	SMP NEGERI 1 DLINGO	SMP NEGERI 1 DLINGO	Dlingo
12.	SMP NEGERI 2 DLINGO	SMP NEGERI 2 DLINGO	Dlingo
13.	SMP NEGERI 1 IMOGIRI	SMP NEGERI 1 IMOGIRI	Imogiri
14.	SMP NEGERI 2 IMOGIRI	SMP NEGERI 2 IMOGIRI	Imogiri
15.	SMP NEGERI 3 IMOGIRI	SMP NEGERI 3 IMOGIRI	Imogiri

NO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
16.	SMP NEGERI 1 JETIS	SMP NEGERI 1 JETIS	Jetis
17.	SMP NEGERI 2 JETIS	SMP NEGERI 2 JETIS	Jetis
18.	SMP NEGERI 3 JETIS	SMP NEGERI 3 JETIS	Jetis
19.	SMP NEGERI 1 KASIHAN	SMP NEGERI 1 KASIHAN	Kasihan
20.	SMP NEGERI 2 KASIHAN	SMP NEGERI 2 KASIHAN	Kasihan
21.	SMP NEGERI 3 KASIHAN	SMP NEGERI 3 KASIHAN	Kasihan
22.	SMP NEGERI 1 KRETEK	SMP NEGERI 1 KRETEK	Kretek
23.	SMP NEGERI 2 KRETEK	SMP NEGERI 2 KRETEK	Kretek
24.	SMP NEGERI 1 PAJANGAN	SMP NEGERI 1 PAJANGAN	Pajangan
25.	SMP NEGERI 2 PAJANGAN	SMP NEGERI 2 PAJANGAN	Pajangan
26.	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	SMP NEGERI 3 PAJANGAN	Pajangan
27.	SMP NEGERI 1 PANDAK	SMP NEGERI 1 PANDAK	Pandak
28.	SMP NEGERI 2 PANDAK	SMP NEGERI 2 PANDAK	Pandak
29.	SMP NEGERI 3 PANDAK	SMP NEGERI 3 PANDAK	Pandak
30.	SMP N 4 PANDAK	SMP NEGERI 4 PANDAK	Pandak
31.	SMP NEGERI 1 PIYUNGAN	SMP NEGERI 1 PIYUNGAN	Piyungan
32.	SMP NEGERI 2 PIYUNGAN	SMP NEGERI 2 PIYUNGAN	Piyungan
33.	SMP NEGERI 1 PLERET	SMP NEGERI 1 PLERET	Pleret
34.	SMP NEGERI 2 PLERET	SMP NEGERI 2 PLERET	Pleret
35.	SMP NEGERI 3 PLERET	SMP NEGERI 3 PLERET	Pleret
36.	SMP NEGERI 1 PUNDONG	SMP NEGERI 1 PUNDONG	Pundong
37.	SMP 2 PUNDONG	SMP NEGERI 2 PUNDONG	Pundong
38.	SMP NEGERI 1 SANDEN	SMP NEGERI 1 SANDEN	Sanden

NO	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI		KAPANEWON
	LAMA	BARU	
39.	SMP NEGERI 2 SANDEN	SMP NEGERI 2 SANDEN	Sanden
40.	SMP NEGERI 1 SEDAYU	SMP NEGERI 1 SEDAYU	Sedayu
41.	SMP NEGERI 2 SEDAYU	SMP NEGERI 2 SEDAYU	Sedayu
42.	SMP NEGERI 1 SEWON	SMP NEGERI 1 SEWON	Sewon
43.	SMP NEGERI 2 SEWON	SMP NEGERI 2 SEWON	Sewon
44.	SMP NEGERI 3 SEWON	SMP NEGERI 3 SEWON	Sewon
45.	SMP NEGERI 4 SEWON	SMP NEGERI 4 SEWON	Sewon
46.	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	SMP NEGERI 1 SRANDAKAN	Srandakan
47.	SMP NEGERI 2 SRANDAKAN	SMP NEGERI 2 SRANDAKAN	Srandakan

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

NAMA KORWIL BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NOMOR	NOMENKLATUR
1.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Bantul- Sewon
2.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Kasihan
3.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Sedayu - Pajangan
4.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Piyungan- Banguntapan
5.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Pleret - Dlingo
6.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Jetis - Imogiri
7.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Kretek – Pundong – Bambanglipuro
8.	Korwil Bidang Pendidikan Kapanewon Pandak – Srandakan - Sanden

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH